

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Implementasi *Indonesia-US Energy Policy Dialogue* dalam Upaya meningkatkan Produksi Energi Indonesia, tidak selamanya kerjasama tersebut berjalan mulus, mengingat kondisi kedua negara menyandang status yang berbeda. Amerika Serikat sebagai negara maju tentunya tidak hanya mempunyai kepentingan di Indonesia saja, melainkan di banyak negara dan di banyak bidang. Kepentingan Amerika Serikat di Indonesia sampai saat ini adalah berupaya untuk mengembangkan sektor-sektor industri Indonesia dengan menjual teknologinya dan berupaya tetap menjaga hubungan bilateral agar tetap baik, yaitu dengan cara mengadakan pertemuan rutin. Di bidang kerjasama energi khususnya, Amerika Serikat dan Indonesia secara aktif masih mengkaji tentang penerapan dan pengembangan teknologi serta informasi dalam upaya menciptakan peningkatan produksi energi Indonesia.

Namun yang selama ini terjadi, konsep hubungan bilateral malah tidak berlaku. Mengingat keuntungan yang didapat lebih banyak didapat oleh pihak Amerika Serikat melalui penjualan teknologinya. Dengan program energi dan teknologi yang ditawarkan Amerika Serikat membuat Indonesia menjadi ketergantungan akan produk AS, apalagi bila mengingat Indonesia belum mampu untuk mengembangkan dan memiliki teknologi tersebut secara mandiri. Memang dalam pengembangan energi memerlukan biaya yang tidak sedikit, namun akan lebih baik apabila Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari adanya program energi dan teknologi AS untuk dipelajari dan dikembangkan sendiri, bukan hanya memakai teknologi dan menjalani programnya saja.

Memang bagi pihak Indonesia sampai saat ini belum begitu dirasakan manfaatnya, mengingat pihak pemerintah yang masih belum siap dalam hal infrastruktur energinya, apalagi dengan iklim politik di Indonesia yang cenderung dinamis dan belum stabil. Dimana pemerintah masih mementingkan kepentingan partai-partai politiknya, bukan kepentingan sektor negaranya. Sehingga program-

program energi yang direncanakan cenderung tertunda terus pelaksanaannya. Padahal persoalan energi di Indonesia masih dikatakan tidak terlalu sulit, hanya memerlukan keseriusan dan ikut campur dari pihak pemerintah saja dalam pengelolaannya. Pemerintah boleh mengundang investor asing namun bukan berarti lepas tangan sepenuhnya dalam prosesnya. Mengingat pemerintah harus mengawasi dengan baik-baik sumber pendapatan negara, hasil sumber daya energi bukan sebagai tolak ukur kekayaan negara saja, melainkan sebagai kekuatan suatu negara.

Dalam kerjasama energi antara Indonesia dengan Amerika Serikat melalui EPD, program-program yang direncanakan bersama secara keseluruhan mengalami keterlambatan mengingat pemerintah lepas tangan sepenuhnya pada pihak pengembang. Aplikasi *Enhance Oil Recovery* (EOR) di Indonesia memang sudah terbukti kualitas dan perkembangannya di Indonesia, namun bahan-bahan pendukung untuk proyek ini sebenarnya bisa dibuat oleh industri dalam negeri sendiri, otomatis dapat menghemat pengeluaran negara ketimbang terus menerus mengandalkan pasokan bahan pendukung dari luar. Turun tangan pemerintah dalam pelibatan industri dalam negeri dirasa penting, mengingat manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang, dimana Indonesia bisa mandiri dalam mengelola proyek EOR dengan murni mengandalkan bahan pendukung buatan tanah air. Dalam kesepakatan pengembangan *Carbon Capture and Storage* (CCS) di Indonesia bukan saja hanya melibatkan industri dalam negeri, namun kesiapan dalam hal modal maupun sumber daya manusianya. Apabila pemerintah mau fokus mengembangkan proyek CCS tentunya tingkat produksi energi di Indonesia dapat meningkat signifikan, walaupun emisi di Indonesia tidak sebesar negara-negara industri, setidaknya proyek ini dapat memanfaatkan emisi yang menguap sia-sia dan menciptakan lingkungan hijau bebas emisi.

Berbeda dengan EOR dan CCS, realisasi pemanfaatan gas di Indonesia masih minim sekali tindak lanjutnya. Walaupun banyaknya pernyataan pemerintah yang menegaskan pentingnya diversifikasi ke gas, hal demikian dianggap hanya sebagai pencitraan politik saja, terbukti dengan tidak adanya kabar mengenai pembangunan infrastruktur pengelola gas milik negara di Indonesia. Padahal sumber daya alam Indonesia ini lebih besar di sektor gasnya,

baik gas bumi dan *shale gas*. Baiknya pemerintah memberikan keringanan bagi para pihak pengembang infrastruktur pengelola gas di Indonesia, janganlah disamakan dengan pengelolaan minyak yang setiap operasinya dikenakan pajak. Hal demikian tentu membuat pembangunannya seakan dibuat menjadi tidak akan pernah terlaksana, padahal banyak sekali investor asing yang bersedia membantu Indonesia membangun infrastruktur tersebut secara cepat dengan teknologi masa kini, namun lagi-lagi pemerintah Indonesia perlu membahas dan mengkajinya kembali yang pada akhirnya terus tertunda karena banyaknya pembicaraan-pembicaraan yang tidak signifikan. Hal serupa juga dirasakan bagi perkembangan *Geothermal Power* atau energi panas bumi di Indonesia, dimana infrastruktur dan kurangnya keseriusan pemerintah lagi-lagi menjadi persoalan dasar terhambatnya proyek-proyek potensial Indonesia. Walaupun beberapa pembangkit panas bumi sudah beroperasi di Indonesia, namun masih dirasa kurang mengingat tingkat produksinya masih jauh dari maksimal karena persoalan dasar tadi.

Persoalan pengembangan energi di Indonesia memang tidak pernah lepas dari perpolitikan di Indonesia, dimana dari hasil perpolitikan tersebut lahirlah kebijakan dalam tata kelola energi di Indonesia. Kebijakan yang sudah ada dan sudah dibuat pemerintah Indonesia sebenarnya sudah sesuai target yang diharapkan. Namun implementasinya sering berbeda mengingat kebijakan dan peraturan yang sudah ada sebelumnya tidak dilanjutkan bahkan cenderung digantikan yang baru. Dimana kebijakan baru tersebut sering melupakan proses-proses yang telah ditempuh kebijakan lama, sehingga pengembangannya menjadi terlambat kembali karena harus memulai dari awal kembali, hal serupa juga berlaku apabila Indonesia sudah berganti kepemimpinan. Dialog dan pertemuan Internasional yang seharusnya mengkaji lanjutan dari pertemuan sebelumnya malah kembali menekankan pentingnya hasil-hasil dari pertemuan sebelumnya, bahkan tidak jarang sampai digelar berkali-kali pertemuan yang sama dengan tema yang lama. Sehingga *Indonesia-US Energy Policy Dialogue* sejatinya belum berhasil menciptakan peningkatan produksi energi Indonesia pada periode 2010-2014, mengingat keadaan Indonesia yang dikatakan masih sangat minim dalam hal infrastruktur energinya.